

# Badan Kehormatan dan Kinerja DPRD



Kabupaten Lampura

Dr. Wahyudi Kumorotomo

Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

[kumoro@map.ugm.ac.id](mailto:kumoro@map.ugm.ac.id)



# Alat Kelengkapan DPRD (ps.353 ayat 1, UU No.27/2009)

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (Bamus)
3. Komisi
4. Badan Legislasi Daerah
5. Badan Anggaran (Panitia Anggaran / Panggar)
6. Badan Kehormatan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

# Beberapa Catatan

1. Ketidakjelasan posisi DPRD dalam sistem *checks & balances* (kawal & imbang); Sebagai unsur penyelenggara pem atau parlemen daerah?
2. Pertanggungjawaban: LPJ menjadi LKPJ → peran dlm perubahan kebijakan berkurang?
3. Review Perda oleh Depdagri (pengawasan represif)
4. Fraksi (bukan alat kelengkapan) lebih berperan daripada Komisi, Bamus & Banggar (alat kelengkapan)
5. Pimpinan dewan *ex-officio* dlm BK, Bamus & Banggar (Masalah pemahaman substansi & kelemahan inisiatif). Bgm mendukung fungsi legislasi yg profesional?



HIPOtesis

# Analisis Stakeholders

- ◆ **DPRD: Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)**
- ◆ **KEPALA DAERAH: Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? (+ visi KDH terwujud)**
- ◆ **TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD): Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)**
- ◆ **SKPD: Getting money first**
- ◆ **PIMPINAN KEGIATAN: Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya**
- ◆ **MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI: (Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lain-lain.**

(+)

Untuk mewujudkan kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat diserasikan?

# Lingkup Tata Tertib Dewan (ps.376 UU 27/2009)



- Sumpah & janji anggota
- Penetapan, pemberhentian, penggantian pimpinan
- Jenis & penyelenggaraan rapat
- Fungsi & tugas lembaga, hak & kewajiban anggota
- Pembuatan keputusan
- Konsultasi DPRD & Pemda
- Penerimaan pengaduan & penyaluran aspirasi masyarakat
- Pengaturan protokoler
- Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli

# Kode Etik Anggota DPRD (ps.377 UU 27/2009)

- Disusun oleh Badan Kehormatan & disepakati seluruh anggota
- Berisi norma yg wajib ditaati setiap anggota
- Keharusan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

“Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada BK-DPRD jika memiliki bukti sah bahwa seorang anggota dewan tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan” (ps. 381)



# MASALAH UMUM di Kabupaten Lampung



1. Penduduk di bawah garis kemiskinan
2. Pengangguran
3. Rendahnya daya saing produk daerah
4. Produktivitas pertanian
5. Akses layanan pendidikan & kesehatan
6. Penegakan hukum & reformasi birokrasi
7. Dukungan infrastruktur
8. Bencana alam (tanah longsor)
9. Kesenjangan antar wilayah.

# Kontributor PDRB Lampura

Tahun	2005		2006	
	Rupiah (juta)	%	Rupiah (juta)	%
<b>Pertanian</b>	1,032,278	40.65	1,060,426	39.60
<b>Pertambangan</b>	18,590	0.73	23,349	0.87
<b>Industri Pengolahan</b>	339,864	13.38	372,060	13.90
<b>Listrik dan Air Bersih</b>	19,454	0.77	19,257	0.72
<b>Bangunan</b>	114,817	4.52	126,585	4.73
<b>Perdagangan, Hotel, Restoran</b>	455,832	17.95	490,255	18.31
<b>Angkutan/Komunikasi</b>	134,696	5.30	140,446	5.25
<b>Bank/Keu/Perum</b>	190,881	7.52	195,856	7.31
<b>Jasa</b>	233,185	9.18	249,325	9.31
<b>Total</b>	2,539,597		2,677,559	



# Produk Legislasi DPRD Lampura

1. Perda No.6/2001: Ijin Usaha Angkutan Umum
2. Perda No.7/2001: Retribusi Terminal
3. Perda No.7/2008: Satuan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Daerah
4. Perda No../2009: Retribusi Pasar dan Pertokoan
5. Perda No../2009 (Perubahan Perda No.14/2006): Tatacara Pemilihan Kepala Desa
6. Perda No../2009 (Perubahan Perda No.9/1992): Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat.

NB: Usulan Perda 2010: Wajib mengaji bagi anak sekolah (?)

Tabel 1. APBD Kabupaten Lampura Tahun Anggaran 2009

Uraian		Jumlah (juta rupiah)	% Total Belanja APBD
Total Pendapatan		616.361	
	Pendapatan Asli Daerah	17.375	2,8
	Dana Perimbangan	592.465	96,1
	Lain-lain Pendapatan	6.521	1,05
Total Belanja		658.532	
Belanja Tidak Langsung		431.996	65,6
	Belanja pegawai	375.680	57,2
	Hibah		
	Bantuan sosial		
	Bagi hasil		
	Bantuan keuangan		
	Belanja tidak terduga		
Belanja Langsung		226.535	34,4
	Belanja pegawai		
	Belanja barang & jasa		
	Belanja modal	104.048	15,8
Pembiayaan Daerah			
	SiLPA		13,4

# Tantangan Belanja Tidak Langsung



- Kenaikan gaji PNS
- Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
- Kenaikan TPAPD menjadi sebesar upah minimum Provinsi Lampung
- Kenaikan Alokasi Dana Desa



# Isu Kinerja DPRD Lampura?

- Kinerja legislasi masih rendah --> Budaya “titip presensi”, paripurna tidak memenuhi kuorum, dsb
- KKN dlm pencalonan Kepala Daerah (?)
- Pengawasan pembangunan; Mis: kinerja rekanan yg rendah (Jl. Kapten Mustofa)
- Perbaikan infrastruktur; Mis: Jalan tembus Kotabumi Selatan, Jalan 30 Pasar Minggu, dsb
- Kesehatan; Gizi buruk di Waymelan, layanan Puskesmas, dsb
- SDM & Pendidikan; KKN dalam penerimaan CPNS, Rendahnya angka kelulusan sertifikasi guru, dsb
- Pemberantasan kemiskinan; Efektivitas PNPM di Kec. Blambangan pagar, Abung Timur, Abung Surakarta.

# Peran Pokok Wakil Rakyat

- Pertimbangkan seluruh warga masyarakat, bukan hanya konstituen.
- Budaya “nrimo” adalah modal bagi stabilitas politik, tetapi hindari perilaku “semau gue” atau “mumpung masih menjabat”.
- Masyarakat Lampung memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. → potensi industri, agribisnis, jasa (?)
- Tingkatkan belanja modal dari anggaran, buat program yg langsung menyentuh kebutuhan pokok rakyat.
- Rumuskan program berbasis agri-bisnis dan industri pengolahan.

Kedudukan sebagai Wakil Rakyat adalah amanah.

Inilah saatnya untuk mengabdikan kepada rakyat Kabupaten Lampung Utara.

TERIMA KASIH